

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar

Meiliani Syifa Widya¹

¹²³Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia

¹meilianisyifa11@gmail.com

Keywords:
 kebijakan publik,
 merdeka belajar,
 pendidikan dasar,
 mutu pembelajaran

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar mulai diadopsi melalui penerapan Kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik, dan pelatihan guru. Guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman guru, kurangnya fasilitas, serta disparitas kesiapan antara sekolah di perkotaan dan daerah 3T. Untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan berkelanjutan bagi guru. Secara keseluruhan, kebijakan Merdeka Belajar memberikan dampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran, meskipun masih membutuhkan upaya perbaikan agar dapat berjalan secara merata di seluruh satuan pendidikan dasar.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan landasan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Abd Rahman et al. (2022) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dirancang secara terstruktur dan terencana guna menciptakan suasana belajar yang mendukung, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi mereka. Di Indonesia, tantangan pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas pembelajaran yang belum merata, khususnya di jenjang sekolah dasar. Perbedaan mutu antara daerah perkotaan dan pedesaan, penggunaan metode pembelajaran yang kurang variatif, serta tingginya beban administrasi bagi guru menjadi kendala utama dalam menciptakan proses belajar yang efektif, interaktif, dan bermakna. Sebagai respon terhadap berbagai permasalahan tersebut, sejak 2019 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar untuk mendorong transformasi sistem pendidikan nasional.

Kebijakan ini bertujuan mereformasi pendidikan dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya otonomi sekolah, memperkuat peran guru sebagai fasilitator, serta memberikan fleksibilitas dalam merancang dan melaksanakan kurikulum. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensinya secara optimal sesuai kebutuhan lokal dan karakter masing-masing siswa. Implementasi nyata Merdeka Belajar terlihat pada penerapan Kurikulum Merdeka, asesmen formatif yang berkelanjutan, serta pengurangan beban administratif guru agar fokus pada kualitas pembelajaran.

Konsep Merdeka Belajar menekankan pentingnya kebebasan berpikir yang harus dimiliki guru terlebih dahulu. Tanpa ruang kebebasan berpikir bagi guru, sulit mengharapkan peserta didik mengembangkan pola pikir yang merdeka. Pendapat ini sejalan dengan Hendri (2020) dan Widiyono et al. (2021) yang menyatakan bahwa kebebasan berpikir guru menjadi dasar utama dalam membentuk siswa yang cerdas, kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan aktif berperan di masa depan (Siregar et al., 2020). Sejalan dengan itu, Bahar dan Sund (2020) menyatakan bahwa Merdeka Belajar bertujuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan serta memberikan kebebasan bagi guru dan peserta didik. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi objek belajar, tetapi sebagai subjek utama yang difasilitasi untuk belajar mandiri, kreatif, dan inovatif dalam memahami materi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan Merdeka Belajar masih menghadapi berbagai tantangan. Sekolah dasar sebagai ujung tombak pendidikan nasional menghadapi kendala mulai dari kesiapan guru dalam memahami dan mengimplementasikan konsep ini, keterbatasan fasilitas pendukung, hingga perbedaan kemampuan adaptasi antar daerah dan jenjang pendidikan.

Selain itu, pelatihan dan pendampingan guru dalam menyusun kurikulum operasional sekolah dan pelaksanaan asesmen diagnostik yang belum merata juga menjadi masalah yang perlu perhatian. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar di sekolah dasar serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Fokus analisis meliputi strategi pelaksanaan kebijakan, peran guru dalam proses belajar, serta hambatan dan potensi yang muncul di lapangan. Dengan memotret dinamika

implementasi secara empiris, artikel ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan yang lebih relevan, kontekstual, dan berkelanjutan, khususnya untuk memperkuat mutu pendidikan dasar di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman, pandangan, dan praktik para pelaku pendidikan di lapangan, khususnya guru, kepala sekolah, dan pengawas. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan di satuan pendidikan dasar. Penelitian dilakukan dengan pemilihan lokasi secara purposive karena sekolah-sekolah tersebut telah menerapkan Kurikulum Merdeka dan termasuk dalam program Sekolah Penggerak yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Subjek penelitian terdiri dari berbagai unsur pendidikan, yaitu guru kelas, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta staf pendamping kurikulum dari Dinas Pendidikan setempat. Untuk memperoleh data yang valid dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

Pertama pengalaman, serta pandangan guru, kepala sekolah, dan pengawas mengenai pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas, interaksi antara guru dan siswa, serta pelaksanaan asesmen formatif di sekolah. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen pendukung seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hasil asesmen siswa, dan laporan kegiatan sekolah yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Tahap kedua adalah penyajian data dengan menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan penarikan makna. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi, yaitu proses mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel serta memvalidasi temuan melalui triangulasi data, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keakuratan dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di tingkat sekolah dasar menunjukkan variasi yang cukup beragam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mayoritas sekolah telah mulai menerapkan prinsip-prinsip Merdeka Belajar melalui penggunaan Kurikulum Merdeka, pelaksanaan asesmen diagnostik, serta penerapan pembelajaran berbasis proyek. Guru diberikan kebebasan untuk merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan peserta didik.

Hal ini sejalan dengan semangat otonomi pendidikan yang menjadi salah satu pilar kebijakan tersebut, di mana Kemendikbudristek (2022) menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum operasional yang fleksibel sesuai dengan karakteristik lingkungan masing-masing. Namun demikian, penerapan kebijakan ini belum merata. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih siap karena didukung oleh akses pelatihan, fasilitas digital, dan pendampingan teknis yang lebih memadai. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya kesempatan pelatihan bagi guru, serta kurangnya dukungan teknis dari dinas pendidikan setempat.

Peran guru memiliki signifikansi kritis dalam kesuksesan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), kontribusi guru dapat dievaluasi melalui empat dimensi kunci: komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi. Temuan empiris mengungkapkan bahwa guru yang telah memperoleh pelatihan Kurikulum Merdeka cenderung lebih responsif dan memiliki keyakinan diri dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang kontekstual serta menerapkan asesmen formatif. Di sisi lain, guru tanpa pelatihan masih mengalami kesulitan dalam memaknai konsep "merdeka" dan menerapkannya dalam desain pembelajaran yang terstruktur dan

terukur. Selain itu, sikap atau disposisi guru sangat memengaruhi proses implementasi kebijakan.

Guru yang memiliki pemahaman baik dan komitmen tinggi terhadap perubahan cenderung lebih terbuka, kreatif, dan berusaha menerapkan metode pembelajaran baru meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan waktu. Sebaliknya, guru yang menganggap kebijakan ini terlalu rumit dan memberatkan seringkali tetap menggunakan kurikulum lama atau mempertahankan metode pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru.

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di tingkat sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan pengalaman pelatihan yang dimiliki oleh sebagian besar guru. Banyak guru belum sepenuhnya menguasai konsep dasar maupun praktik Kurikulum Merdeka, terutama dalam hal pembelajaran diferensiasi dan pelaksanaan asesmen diagnostik.

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur menjadi hambatan serius, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Kendala seperti akses internet yang terbatas, kekurangan media pembelajaran, serta kondisi ruang kelas yang kurang memadai menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan ini. Di sisi lain, meskipun kebijakan Merdeka Belajar memberikan otonomi bagi sekolah, kenyataannya banyak sekolah masih sangat bergantung pada arahan dari dinas pendidikan. Hal ini mengakibatkan inisiatif dan kreativitas lokal belum berkembang secara maksimal. Tantangan lainnya adalah perubahan budaya kerja di kalangan guru dan lingkungan sekolah. Peralihan dari sistem pembelajaran konvensional yang seragam dan berpusat pada guru menuju metode yang lebih fleksibel dan berorientasi pada siswa memerlukan waktu, kesiapan mental, serta dukungan penuh dari berbagai pihak.

Meskipun pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar masih menghadapi berbagai kendala, beberapa sekolah melaporkan bahwa penerapan konsep ini telah memberikan dampak positif terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran. Guru menjadi lebih reflektif dalam merancang kegiatan belajar, sementara siswa menunjukkan keterlibatan

yang lebih aktif dalam diskusi dan eksplorasi materi. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dikaitkan dengan situasi dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Perbaikan kualitas pembelajaran juga terlihat dari perubahan pendekatan guru dalam melakukan penilaian. Jika sebelumnya penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif, kini guru mulai menerapkan asesmen diagnostik untuk mengenali kemampuan dasar dan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Perubahan ini sejalan dengan pandangan Fullan (2001) yang menyatakan bahwa transformasi pendidikan membutuhkan strategi yang mampu memengaruhi praktik dan keyakinan guru di dalam kelas.

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di tingkat sekolah dasar merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi pendidikan yang lebih relevan, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penerapan kebijakan ini mulai menunjukkan kemajuan positif melalui penggunaan Kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik, serta pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan sekolah masing-masing.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum merata di seluruh wilayah. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan umumnya lebih siap dibandingkan dengan sekolah di wilayah pedesaan maupun daerah 3T, yang masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pelatihan, fasilitas, dan pendampingan teknis. Ketimpangan kesiapan ini menimbulkan disparitas dalam penerapan prinsip prinsip Merdeka Belajar di lapangan.

Peran guru sangat menentukan keberhasilan kebijakan ini. Guru yang telah mengikuti pelatihan terkait Kurikulum Merdeka cenderung memiliki sikap terbuka, responsif terhadap perubahan, dan mulai mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan reflektif. Namun, sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari karena

keterbatasan pemahaman dan dukungan dari pihak terkait. Di sisi lain, kebijakan ini mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran, baik dari segi proses pembelajaran di kelas maupun hasil belajar peserta didik.

Daftar Pustaka

- Fadhli, R. (2022). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 5(2), 147–156.
- Ramadhan, S., & Megawati, S. (2023). Implementasi kebijakan merdeka belajar kampus Merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 1581–1592.
- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). Pengertian Pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Hendri N. 2020. Merdeka Belajar: Antara Retorika dan Aplikasi. *J E Tech*. 8(1):1–29.
- Widiyono A, Irfana S, Firdausia K. 2021. Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. *Metod Didakt J Pendidik Ke-SD-an*. 16(2):102–107.
- Siregar N, Sahirah R, Harahap AA. 2020. Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri Fitrah *J Islam Educ*. 1(1):141–157. Bahar H, Sundi VH. 2020. Merdeka Belajar Untuk Kembalikan Pendidikan Pada Khittahnya. In: *Pros SAMASTA Semin Nas Bhs dan Sastra Indones*. P. 115–122.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2022).
- Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Fullan, M. (2001). *The New Meaning of Educational Change* (3rd ed.). New York: Teachers College Press.